

ANALISIS RATIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KOTA / KABUPATEN)

**ANALISIS KEUANGAN ADALAH USAHA MENGIDENTIFIKASI CIRI-2
KEUANGAN BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN YANG TERSEDIA.**

ANALISIS RATIO KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN SWASTA :

- 1. RATIO LIKUIDITAS YAITU RATIO YG MENGGAMBARAKAN
KEMAMPUAN PERUSAHAAN MEMENUHI KEWAJIBAN
DENGAN SEGERA.**
- 2. RATIO LEVERAGE YAITU RATIO UNTUK MENGUKUR
PERBANDINGAN DANA YG DISEDIAKAN OLEH PEMILIK
DENGAN DANA YG DIPINJAM PERUSAHAAN DARI KREDITUR.**
- 3. RATIO AKTIVITAS YAITU RATIO UNTUK MENGUKUR EFEKTIF
TDKNYA PERUSAHAAN DLM MENGGUNAKAN DAN
MENGENDALIKAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI
PERUSAHAAN**
- 4. RSATIO PROFITABILITAS YAITU RATIO YG MENGUKUR
KEMAMPUAN PERUSAHAAN DLM MENGHASILKAN LABA**

RATIO-RATIO TSB UNTUK MELAYANI PIHAK YG BERKEPENTINGAN DENGAN PERUSAHAAN :

- 1. PARA KREDITUR, BAIK JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG YAITU UNTUK MENILAI KEMAMPUAN PERUSAHAAN DLM MEMENUHI KEWAJIBANNYA**
- 2. PEMEGANG SAHAM ATAUPUN PEMILIK PERUSAHAAN, YAITU UNTUK MENGANALISIS SAMPAI SEJAUH MANA PERUSAHAAN MAMPU MEMBAYAR DEVIDEN ATAUPUN MEMPEROLEH DEVIDEN**
- 3. PENGELOLA (MANAJEMEN) YAITU SEBAGAI INFORMASI YG DAPAT DIPAKAI SEBAGAI LANDASAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN.**

ANALISIS RATIO KEUANGAN PEMERINTAH TERDIRI :

- 1. RATIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH;**
- 2. RATIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAD;**
- 3. DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)**
- 4. RATIO KESERASIAN**
- 5. RATIO PERTUMBUHAN**

ADAPUN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN RATIO KEUANGAN PADA APBD ADALAH:

- 1. DPRD SEBAGAI WAKIL DARI PEMILIK DAERAH (MASYARAKAT)**
- 2. PIHAK EKSKUTIF SEBAGAI LANDASAN DLM MENYUSUN APBD BERIKUTNYA**
- 3. PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI SEBAGAI BAHAN MASUKAN DLM MEMBINA PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
- 4. MASYARAKAT DAN KREDITUR, SEBAGAI PIHAK YG AKAN TURUT MEMILIKI SAHAM PEMDA, BERSEDIA MEMBERIKAN PINJAMAN ATAU MEMBELI OBLIGASI**

1. RATIO KEMANDIRIAN KEUANGAN

- a. KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (OTONOMI FISCAL) MENUNJUKKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBIAYAI SENDIRI KEGIATAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TELAH MEBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN YANG DIPERLUKAN DAERAH**

- b. KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DITUNJUKKAN BESAR KECILNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIBANDINGKAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI SUMBER LAIN : MISALNYA BANTUAN PEMERINTAH PUSAT, PROPINSI MAUPUN DARI PINJAMAN.**

c. RATIO KEMANDIRIAMENGGAMBARAKAN KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP SUMBER DANA EKSTERN (PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI)

SEMAKIN TINGGI RATO KEMANDIRIAN BERARTI TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BANTUAN PIHAK EKSTERN SEMAKIN RENDAH.

d. RATIO KEMANDIRIAN MENGGAMBARAKAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DAERAH.

SEMAKIN TINGGI RATIO KEMANDIRIAN, SEMAKIN TINGGI PARTISIPASI MASYARAKAT DLM MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, YANG MERUPAKAN KOMPONEN UTAMA PENDAPATAN ASLI DAERAH.

RATIO KEMANDIRIAN TAHUN 2001 S/D 2003

PENDAPATAN	TH 2001	TH 2002	TH 2003
SISA PERHIT ANGGARAN TAHUN LALU	2.467.000;	15.730.000;	22.018.000
P.A.D	5.801.000	11.741.000;	12.700.000;
PEND DARI PEMBERIAN PEMERINTAH	91.024.000	106.494.000;	127.883.000
PINJAMAN DAERAH	2.874.000;	11.641.000;	
JUML PENDAPATAN	102.166.000	145.606.000	162.601.000
RATIO KEMANDIRIAN	6,18%	9,94%	9,93%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

$$\text{RASIO KEMANDIRIAN} = \frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{BANTUAN PEM PUSAT/ PROVINSI DAN PINJAMAN}}$$

$$\text{RASIO KEMANDIRIAN 2001} = \frac{5.801.000}{93.898.000} \times 100 \% = 6,18 \%$$

$$\text{RASIO KEMANDIRIAN 2002} = \frac{11.741.000}{118.135.000} \times 100 \% = 9,94 \%$$

$$\text{RASIO KEMANDIRIAN 2003} = \frac{12.700.000}{127.883.000} \times 100 \% = 9,93 \%$$

2. RASIO EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI P A D

a. RASIO EFEKTIFITAS PAD

MENGGAMBARAKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MERALISASIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DIRENCANAKAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN BERDASARKAN POTENSI RILL DAERAH.

KEMAMPUAN DAERAH DIKATEGORIKAN EFEKTIF JIKA RATIO EFEKTIFITAS YANG DICAPAI MINIMAL 100 %, SEMAKIN TINGGI SEMAKIN BAIK

$$\text{RASIO EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAD}}{\text{TARGET PENERIMAAN PAD}}$$

b. RASIO EFISIENSI PAD

MENGGAMBARKAN PERBANDINGAN ANTARA BESARNYA BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH PENDAPATAN DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI PENDAPATAN YANG DITERIMA..

KINERJA PEMDA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DIKATAGORIKAN EFISIEN APABILA RASIO YANG DICAPAI KURANG DARI SATU ATAU DI BAWAH 100%. SEMAKIN KECIL RASIO EFISIENSI BERARTI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEMAKIN BAIK.

$$\text{RASIO EFISIENSI} = \frac{\text{BIAYA UTK MEMUNGUT PAD}}{\text{REALISASI PENERIMAAN PAD}}$$

RATIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI 2002 DAN 2003

NO	KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN 2002		TAHUN ANGGARAN 2003	
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
1	PAJAK DAERAH	1.672.800	1.687.120	1.844.500	1.934.156
2	RETR DAERAH	721.719	870.017	1.247.060	1.294.439
	JUMLAH	2.394.519	2.557.137	3.091.560	3.228.595
	BIAYA PUNGUT	1.571.344	1.609.762	1.894.379	1.788.797
	RATIO EFEKTIVITAS		106,79%		104,43%
	RATIO EFISIENSI		62,95%		55,40%

3. DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH PAD, BAGIAN DAERAH (BD) DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM, DAN BAGIAN DAERAH LAINNYA SERTA DANA ALOKASI UMUM (DAU) SETELAH DIKURANGI BELANJA WAJIB (BW), DENGAN PEMJUMLAHAN ANGSURAN POKOK, BUNGA, BIAYA PINJAMAN LAINNYA YANG JATUH TEMPO.

$$(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}$$

$$\text{DSCR} = \frac{\text{TOTAL (POKOK ANGSURAN+BUNGA+BIAYA PINJAMAN)}}{\text{TOTAL (POKOK ANGSURAN+BUNGA+BIAYA PINJAMAN)}}$$

DIMANA:

PAD = PENDAPATAN ASLI DAERAH

BD = BAGIAN DAERAH (PBB + BPHTP + SDA)

DAU= DANA ALOKASI UMUM

BW = BELANJA WAJIB

1. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PERSYARATAN

a. JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN DAERAH YANG WAJIB DIBAYAR MAKSIMAL 75% DARI PENERIMAAN PAD TAHUN SEBELUMNYA

b. DEBT SERVICE COPERAGE RATIO (DSCR) MINIMAL 2,5

2. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PENGGUNAAN PINJAMAN

a. PINJAMAN JANGKA PANJANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBIYAI PEMBANGUNAN YANG DAPAT MENGHASILKAN PENERIMAAN KEMBALI UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

b. PINJAMAN JANGKA PENDEK UNTUK PENGATURAN ARUS KAS

3. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PROSEDUR

a. MENDAPAT PERSETUJUAN DARI DPRD

b. DITUANGKAN DALAM KONTRAK

PERHITUNGAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

NO	URAIAN	2001	2002	2003
	PENDAPATAN			
1	SILPA TAHUN LALU	902.000	1.260.000	2.875.000
2	PAD	7.611.000	8.972.000	9.835.000
3	BHP/BP	3.465.000	3.182.000	4.265.000
4	SDA	20.137.000	50.365.000	78.240.000
5	DAU	9.183.000	8.765.000	7.765.000
	BELANJA			
6	BELANJA RUTIN (+ ASS PINJ +BUNGA)	31.700.000	65.100.000	100.050.000
7	PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA	162.000	122.500	115.000
A	DSCR	53,68	50,48	0,49
B	DSCR MINIMAL	2,5 X	2,5 X	2,5 X
C	MAKSIMAL ANGSURAN POKOK PINJAMAN	3.478.464	2.473.520	TDK BOLEH PINJAM

4. RATIO KESERASIAN KEUANGAN

MENGGAMBARKAN BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH MEMPRIORITASKAN ALOKASI DANANYA PADA BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN SECARA OPTIMAL.

KETERANGAN	TH 2001	TH 2002	TH 2003
RUTIN	75.189.000	73.886.000	79.403.000
PEMBANGUNAN	21.956.000	59.249.000	65.264.000
TOTAL A.P.B.D	97.145.000	133.135.000	144.667.000
RATIO BELANJA RUTIN THD APBD(%)	77,40	55,50	54,89
RATIO BELANJA PEMB THD APBD(%)	22,60	44,50	45,11

5. RATIO KEMAMPUAN PAD MEMBIAYAI BELANJA RUTIN

RATIO INI MENGGAMBARAKAN KEMAMPUAN PAD DALAM MEMBIAYAI BELANJA RUTIN, SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI KEMAMPUAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH YANG NANTI NYA DAPAT DIGUNAKAN MENENTUKAN BESARNYA SUMBER DANA EKSTERNAL

KETERANGAN	TH 2001	TH 2002	TH 2003
P.A.D	5.801.000	11.741.000	12.700.000
BELANJA RUTIN	75.189.000	73.886.000	79.403.000
RATIO PAD THD BELANJA RUTIN (%)	7,72	15,89	15,99

6. RATIO PERTUMBUHAN (GROWTH RATIO)

RATIO INI MENGUKUR SEBERAPA BESAR KEMAMPUAN PEMDA DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAINYA DARI PERIODE KE PERIODE BERIKUTNYA

KETERANGAN	TH 2001	TH 2002	TH 2003
P.A.D	8.801.000	11.741.000	12.700.000
PERTUMBUHAN P A D	-	33,40 %	8,17 %
BELANJA RUTIN	75.189.000	73.886.000	79.403.000
PERTUMBUHAN B. RUTIN	-	(1,73 %)	7,47 %